

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Fickar Hadjar ed. Al, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan*, Jakarta, 2003.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Amelia, Ira, Desmiyawati dan Nur Azlina, *Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan)*, Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Edisi III, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Baghir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Crince le Roy, *Kekuasaan Ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang, 1981.
- Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta.
- Firmansyah Arifin,dkk, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta, 2005.
- HR. Syaukani, *Otonomi Daerah demi Kesejahteraan Rakyat*, Nuansa Madani, Jakarta, 2004.
- Jan. Kooiman, *Modern Governance: New Government Society Interactions*. London: Sage Publications, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Komisi Yudisial dan Reformasi Keadilan*, ELSAM, Jakarta, 2004.

- _____, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, The Biografy Institute, Jakarta, 2007.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah)*, Alumni, Jakarta, 2006.
- Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta.
- Lukman Ali dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(1), 2016.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1988.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, *Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Dan Kaitannya Dengan Good Governance (Gg)*, Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ni.Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Nurwita Ismail, *Kewenangan Dekonsentrasi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Gorontalo Law Review, Volume 2 No. 1 April 2019.
- Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, Indo Hil. Co, Jakarta, 2003.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Interpratama Offset, Jakarta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 1994.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, 2008.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- _____, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*, PT. Refika Aditama Bandung, Bandung, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung, 2003.
- Tauda Gunawan A, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Gramedia, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeleolaan Keuangan Daerah.

C. Sumber Lain

A. A. Rosyada, *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintah, 4(1), 2016.

Agus Suseno, *Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Pembangunan*, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan–Apr 2010.

BPKP, *Kegiatan BPKP*, <https://www.bpkp.go.id/konten/11/Kegiatan.bpkp> , Diakses pada tanggal 24 Januari 2023.

- BPKP, *Sejarah Singkat BPKP*, <https://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp> , Diakses pada tanggal 24 Januari 2023.
- BPKP, *Stakeholder dan Shareholder BPKP*, <https://www.bpkp.go.id/konten/8/Stakeholder-dan-Shareholder.bpkp> , Diakses pada tanggal 24 Januari 2023.
- Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Law Reform, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019.
- Alit Ayu Meinarsari dan Harsanto Nursadi, Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 8, Agustus 2022.
- B. Anggiriawan & M. G. Wirakusuma, *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Penerapan Good Governance Sebagai Variabel Moderasi*, E-Jurnal Akuntansi, 2015.
- Bambang Saputra & Mahmudi, Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *JAAI*, Vol. 9, (No. 1), 2012.
- CUI-ITB, *Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.15, No. 1, 2004.
- E. Zeyn, *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan*, *Trikonomika*, 10(1), 2011.
- Edward H, *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, Vol XLII No. 1, Tahun 2016.
- Dinda Audriene Muthmainah “Menelisik Cara Kerja BPK dalam Memeriksa Keuangan Negara” diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170731084819-84-231374/menelisik-cara-kerja-bpk-dalam-memeriksa-keuangan-negara>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

- Dinoroy Marganda Aritonang, *Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. XI, No.3 Desember 2014.
- Dhils Noviades, *Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2013.
- Dhyan Virawan Suhendra, *Pengawasan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13960/Pengawasan-Kuangan-Negara-Agar-Terhindar-dari-Penyimpangan.html> , Diakses pada tanggal 24 Januari 2023.
- Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2021.
- Ika Setyorini, *Kewenangan Kebijakan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. VI No. 01, Mei 2020.
- Lucy Auditya, Husaini dan Lismawati, *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, Jurnal Fairness Vol 3, No. 1, 2013.
- M. Oktarina, K. Raharjo, dan R. Andini, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang*, Journal Of Accounting, 2(2), 2016.
- Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(1), 2016.
- Mieke Rayu Raba, *Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017.

- Muammil Sunan & Abdurrahman Senuk, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- N. Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 2017.
- Nasrullah Nazsir, *Good Governance*, MEDIATOR, Vol. 4 No.1 2003.
- Nicholas Sambanis & Branko Milanovic, Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries, *Comparative Political Studies*, Vol. 47, (No. 13), 2014.
- Nubatonis, E. Sondil, Sugeng Rusmiwari dan Son Suwasono, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1), 2014.
- Nurwita Ismail, *Kewenangan Dekonsentrasi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Gorontalo Law Review, Volume 2 No. 1 – April 2019.
- Philipus M. Hadjon, *Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 4, No 1 (2015).
- PKP2A I LAN Bandung, *Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/ kota Kepada Desa*, PKP2A I LAN Bandung, Bandung, 2006.
- Poni Sukaesih Kurniati, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume. III No. 1/Desember 2013.
- Silvia Ningsih, Afridian Wirahadi, Amy Fontanella, Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang, *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol 13 No.1, 2018.